NOMI
NGUNAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

Oleh :
Febi Bahtara
(01013120008)

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2005

S
352.135 2107
Bah
a
C050313
2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT
PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

R. 12062
12344

Oleh :
Febi Bahtara
(01013120008)

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDRALAYA

TANDA PERSETUJUAN AKHIR

Nama	**: Febi Bahtara**
NIM	**: 01013120008**
Jurusan	**: Ekonomi Pembangunan**
Mata Kuliah Pokok	**: Keuangan Daerah**
Judul Skripsi	**:Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan**

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Tanggal **: 14 Pebruari 2005**

Disetujui oleh

Pembimbing 1

Drs. Fachrizal Bachri, MSc

NIP. 131411409

Pembimbing II

Drs. Nazeli Adnan, MSi

NIP. 131801648

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

Oleh :
Febi Bahtara
01013120008

Telah dipertahankan di depan panitia Ujian Komprehensif
pada hari Senin, 14 Pebruari 2005
dan dinyatakan telah memenuhi untuk diterima
panitia Ujian Komprehensif

Indralaya, 14 Pebruari 2005

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Drs.Fachrizal Bachri, M.Sc	Drs.Nazeli Adnan, M.Si	Drs. M.Umar Nuh
NIP. 131411409	NIP. 131801648	NIP. 130353380

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Drs. Suhel, M.Si
NIP.131993979

"Aku tahu ku tak kan bisa,

menjadi seperti yang engkau minta,

namun selama nafas berhembus aku kan mencoba,

menjadi seperti yang kau minta"

(Chrisye ; Dekade)

Skripsi ini Ku persembahkan :

- Untuk dunia pendidikan Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan.** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc dan Bapak Drs.Nazeli Adnan, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dengan tulus dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dra. Badia Perizade, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi
2. Bapak Drs. Suhel, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
3. Bapak Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi 1
4. Bapak Drs. Nazeli Adnan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2
5. Bapak Drs. M. Umar Nuh selaku Dosen tamu penguji komprehensif
6. Seluruh tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini
7. Seluruh bapak/ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan
8. Kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah banyak memberikan dorongan moral pada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Kepada teman-teman seangkatanku (EP 2001), terima kasih *friend*..... tanpa kalian aku tidak akan ada apa-apanya

10. Kepada Syamsul Pairuz selaku ketua angkatan EP 2001 yang telah memimpin EP 2001 khususnya penulis dari semester awal hingga akhir
11. Kepada Wayan dan Yusri yang menemani penulis berjuang habis-habisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Bobi, Nita, Nuke, dan Feni yang telah membantu penulis mencari data dan meminjamkan buku-buku panduan
13. Kepada teman-teman penulis Ucok, Ahmad, Valino, Nyoman, Rangga, Sapta dan Ndek yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
14. Kepada Buah Gaplei yang selalu menemaniku dalam mengisi kesuntukkanku
15. Kepada RX King dan Honda Tiger ku yang selalu menemaniku kemanapun aku melangkah
16. Kepada Peter Pan, Chrisye, Rio Febrian, Siti Nurhaliza, MLTR, dan DJ mix yang telah menemani penulis dengan karya-karya seninya.
17. Kepada M. Bai yang membantu penulis dalam makan malam penulis (satenya mas.....)
18. Kepada Hasan, Mamat yang memiliki selera sama dalam merokok (Surya 16)
19. Kepada Rokok Surya 16, Gudang Garam Filter yang menemani penulis menyelesaikan skripsi ini.
20. Kepada kecek terima kasih atas penyuplaian VCD nya
21. Kepada PT. Expan Nusantara (Medco Energi) terima kasih atas bea siswanya

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu selama pendidikan sampai selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan atas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

Wassalam,

Indralaya, 15 Pebruari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan Pemerintah dalam Perekonomian 10
2.2 Otonomi Daerah 17
2.3 Pendapatan Asli Daerah 18
2.4 Pajak 19
2.5 Penelitian Sebelumnya 26
2.6 Kerangka Pemikiran 29
2.7 Hipotesis 31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 32
3.2 Data dan Sumber Data 32
3.3 Alat analisis 32
3.4 Batasan Variabel Operasional 38

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR : 050313
TANGGAL : 28 FEB 2005

BAB I V GAMBARAN UMUM

4.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah 40
4.2. Jarak dari Palembang ke Kabupaten/Kota 42
4.3. Jalan dan Panjang Jalan 42
4.4. Wilayah Administrasi dan Penduduk 44
4.5. Perekonomian 46

BAB V **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan**

5.1. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Propinsi Sumatera Selatan 56

5.2. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

5.2.1 Hasil Estimasi 59
5.2.2 Pengujian Statistik 61
5.2.2.1. Uji T- Hitung 61
5.2.2.2. Uji F – Hitung 63
5.2.3 Analisis Ekonomi 63
5.2.4 Pengujian Ekonometrika 67
5.2.4.1. Uji Gejala Multikolinieritas 67
5.2.4.2. Uji Gejala Heterokodastisitas 70
5.2.4.3. Uji Gejala autokorelasi 72

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan 73
6.2. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1. Penerimaan BBNKB Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1994/1995 – 2003 6

Tabel 4.1. Panjang Jalan Sumatera Selatan Tahun 1994 – 2003 43

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Sumatera Selatan Tahun 1994 – 2003 45

Tabel 4.3. PDRB dengan Migas Sumatera Selatan Tahun 1994/1995-2003 47

Tabel 4.4. Jumlah Kendaraan Bermotor Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1994-2003 49

Tabel 4.5. Jumlah Subyek Pajak BBNKB Propinsi Sumatera Selatan Periode 1994/1995-2003 51

Tabel 4.6. Pajak Daerah Sumatera Selatan Tahun Anggatan 1994/1995 – Desember 2003 54

Tabel 5.1. Kontribusi Penerimaan BBNKB terhadap Pajak Daerah Sumatera Selatan Tahun Anggaran 1994/1995-2003 57

Tabel 5.2. Hasil estimasi metode enter 60

Tabel 5.3. Uji Heterokodastisitas 71

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran 31

Gambar 4.1. Peta Propinsi sumatera Selatan 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lamp. 1 Hasil estimasi metode *Enter* 78

Lamp. 2 Hasil estimasi metode *stepwise* 80

Lamp. 3 Hasil estimasi uiji multikolinieritas 82

Lamp. 4 Hasil Estimasi uji heterokodastisitas 88

Lamp. 5 Hasil Estimasi uji Autokorelasi 90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan disegala bidang merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan. Salah satu asas pembangunan berbunyi bahwa pembangunan nasional harus berdasarkan kepercayaan dan kemampuan atau kekuatan sendiri. Oleh karena itu segenap modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan, digali dan diolah menjadi kekuatan nasional yang nyata.

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu kemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah.

Indonesia mengembangkan sistem otonomi daerah guna membangun semangat baru daerah-daerah propinsi untuk lebih mengembangkan daerahnya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya lagi dengan pemerintah pusat. Dikembangkannya sistem otonomi daerah ini secara tidak langsung membuat setiap daerah propinsi untuk berkreatif dan berinovasi demi kemajuan daerah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Sementara itu dengan semakin maju dan berkembangnya masyarakat serta bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, maka kegiatan dan pengeluaran masyarakat semakin meningkat. Keadaan ini berarti semakin meningkat pula pengeluaran pemerintah guna membiayai kegiatan yang semakin bertambah tersebut. Untuk itu pemerintah harus mengupayakan peningkatan sumber penerimaan daerah yang salah satunya melalui pemungutan pajak.

Pajak merupakan salah satu alat kebijakan penting bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial yang mengandung sasaran sebagai berikut (Mohammad Zain; 2000 : 45), yaitu :

a. Pengalihan sumber-sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
b. Pendistribusian penghasilan secara riil dalam kelas-kelas penghasilan (*vertical equity*) dan secara merata terhadap masyarakat yang berpenghasilan sama (*horizontal equity*)
c. Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan perluasan kesempatan kerja.

Sistem perpajakan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah, akibat peranan pemerintah yang semakin meluas dalam pembangunan masing-masing daerah otonominya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu bagian dari sumber penerimaan daerah di mana diatur dalam Undang-Undang No.25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Komponen-komponen

sumber penerimaan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 25/1999 adalah :

a) Pendapatan Asli Daerah

b) Dana Perimbangan

c) Pijaman Daerah

d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Komponen di atas merupakan sumber penerimaan daerah otonom, di mana diberikan hak dan kewajiban oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya masing-masing.

Adapun unsur-unsur dari Pendapatan Asli Daerah meliputi:

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah

Pajak dan Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dengan pembagian sebagai berikut (Suparmoko; 2001 : 62) yaitu :

1. Jenis pajak daerah propinsi terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan.Bermotor

2. Jenis Pajak Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas :

a. Pajak Hotel

b. Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir

Dalam mengelola keuangan daerah salah satu unsur yang cukup menentukan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk mengelola dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, karena kemampuan dan kemandirian suatu daerah dilihat dari seberapa besar PAD daerah tersebut dapat digali dan direalisasikan sesuai dengan potensi daerah tersebut.

Banyak sumber-sumber potensi yang dapat digali oleh daerah otonom untuk meningkatakan pendapatan daerahnya sendiri, salah satunya adalah pajak daerah berupa bea balik nama kendaraan bermotor.

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak ini adalah pergerakan kendaraan bermotor, kecuali pergerakan kendaraan bermotor kepada pemerintah

pusat dan daerah, kedutaan dan konsulat asing. Sedangkan subjek pajak atau wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah besarnya tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 10 persen untuk kendaraan bermotor bukan umum, 10 persen untuk kendaraan bermotor umum, dan 3 persen untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1 persen untuk kendaraan umum dan bukan umum serta 0,3 persen untuk kendaraan alat-alat berat dan besar. Sedangkan untuk tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1 persen untuk kendaraan bukan umum, 0,1 persen untuk kendaraan umum serta 0,03 persen untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Bea balik nama kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah daerah di wilayahnya berdasarkan undang- undang yang berlaku.

Perkembangan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun1994/1995 sampai dengan 2003 dapat dilihat pada tabel 1. 1 berikut ini:

Tabel 1.:
Penerimaan BBNKB Propinsi Sumatera Selatan
1994/1995-2003

Tahun	BBNKB (Rp)	Pertumbuhan (%)
1994/1995	21.763.921.000	-
1995/1996	32.401.665.000	48,88
1996/1997	35.978.732.000	11,03
1997/1998	39.881.161.000	10,84
1998/1999	14.536.506.000	-157,35
1999/2000	25.562.543.000	75,85
2000	54.918.882.000	114,84
2001	85.103.890.000	54,96
2002	101.741.286.000	19,55
2003	138.508.147.000	36,14

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, Dipenda dalam angka beberapa tahun (tahun 1994 – 2003)

Tabel tersebut menunjukkan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor relatif naik dari tahun ke tahun. Namun pertumbuhannya mengalami fluktuasi, bahkan pada periode 1998/1999 pertumbuhannya mencapai angka negatif sebesar -157,35 persen dan merupakan pertumbuhan yang terendah sepanjang periode 1994/1995 sampai 2003. Hal ini diakibatkan adanya krisis moneter dan kerusuhan sehingga para penduduk enggan untuk membeli kendaraan bermotor. Akan tetapi pada tahun–tahun berikutnya penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor kembali terjadi peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai pertumbuhan sebesar

114,84 persen pada tahun 2000. Pada tahun 2003 terjadi peningkatan penerimaan BBNKB sebesar 138,5 milyar dengan pertumbuhan sebesar 36,14 persen.

Semakin tinggi penerimaan pajak dari sektor ini juga disebabkan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Selatan selama periode 1994/1995 sampai 2003, baik kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat. Permintaan akan alat transportasi akan berhubungan dengan jumlah penduduk, panjang jalan yang tersedia dan juga daya beli masyarakat itu sendiri. Dengan asumsi setiap pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan penunggakan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka penerimaan daerah akan meningkat. Apabila jumlah penduduk meningkat yang diiringi pendapatannya yang meningkat maka akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli alat transportasi akan meningkat yang pada akhirnya penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor akan meningkat.

Selain itu pertumbuhan ekonomi tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor. Pertumbuhan ekonomi diukur dari naik-turunnya PDRB dan jumlah penduduk. Apabila pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun (ceteris paribus) akan menyebabkan naiknya pendapatan perkapita yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah sehingga kemampuan masyarakat tersebut untuk membeli kendaraan bermotor akan meningkat dan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan.

1.2 Perumusan Masalah

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi memberikan konsekuensi adanya pembagian sumber-sumber keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Kemampuan daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri merupakan faktor esensial dari perwujudan otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam komposisi penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Sumatera Selatan ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi besarnya penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Suamtera Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Suamtera Selatan.
2. Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan
3. Penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai refrensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi yang berhubungan dengan keuangan daerah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.

Daftar Pustaka

Anwar Nasution. *Aspek Ekonomi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Prisma 5*. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta : 1984

Anwar Saddat. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

BPS, *Sumatera Selatan dalam Angka 1994-2003*

Brotodiharjo R. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Eresco-Jakarta-Bandung :1984.

Davey, K.J. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. UI Press. Jakarta : 1988

Dinas Pendapatan Daerah, *Dipenda Dalam Angka 1994-2003*

Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta :1996

Gujarati, Damodar. *Ekonometrika Dasar*. Diterjemahkan oleh Sumarno Zain, Erlangga. Jakarta :1978

Guritno Mangkoesoebroto. *Ekonomi Publik*. BPFE. Yogyakarta : 1998

Harsanty. *Analisis Kontribusi Pajak daerah terhadap Penerimaan PAD di Kabupaten MURA*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya : 2000

Hakim. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Tontonan Kota Palembang* Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya : 1989

Jhingan Mc. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT.Raja grafindo Persada . Jakarta : 1994

Mardiasmo. *Perpajakan. Edisi Revisi 2001*. Penerbit Andi Yogyakarta :2001

Mohamad Zain. *Pajak Daerah Serta Sumber-Sumber Pendapatan Daerah* : 2000

Nachrowi, Djajal. *Penggunaan Teknik Ekonometrik*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2002

Papanek, F. Gustaf. *Ekonomi Indonesia*. PT Gramedia. Jakarta : 1987

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Jakarta

Slamet Bamim. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah.* Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Sriwijaya: 2001

Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Ekonomi.* PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta :1999

Suparmoko. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah.* BPFE Yogyakarta: 2001

Suparmoko. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek.* BPFE Yogyakarta: 1999

Suseno, Hg. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia.* Kanisius. Yogyakarta :1990

Susilo. *Sebuah Resep Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendekatan ZOPP.* Lintas Ekonomi. FE universitas Brawijaya: 2000

Sutrisno, P.H. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara.* Cetakan ketiga. LPE UGM. Yogyakarta : 1984

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah. Jakarta. Sinar Grafika

Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta Sinar Grafika

Uppal, J.S. The Indonesian Tax Structure. Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Volume XXXIV No. 1. LPEM-FE UI. Jakarta: 1986